



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

LKjPD

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2024, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sememua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 31 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. BAKLAN MUSTAQIM, M.Si
Utama Muda
NIP. 19670727 198603 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Disetiap akhir periode perangkat daerah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan kinerja tahunan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran. Sehingga hasil pengukuran kinerja dimaksud dilaporkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2024. Olehnya berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang terjabar dalam Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran:

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaiannya telah dituangkan di dalam rencana kinerja tahunan. Di tahun 2024 dapat terakomodir 2 (Dua) Program dan 9 Kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 penerimaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar **Rp 1.649.061.781.600,00** dan dapat direalisasi sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 1.791.009.260.522,46** atau **108,61 %**

Dengan adanya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. A. MUSTAQIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. CASCADING KINERJA	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3. ISU-ISU STRATEGIS	26
1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA DAN PRASARANA	27
1.5. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023.....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	33
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	35
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	44
2.5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1 CAPAIAN KINERJA	50
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	50
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023	53
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	59
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	60
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.....	61
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	63
g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	64
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	75
3.3 INOVASI	80
BAB IV PENUTUP	83
- Perjanjian Kinerja (PK)	
- Lain-lain yang Dianggap Perlu	

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 1.1.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 1.2.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 1.3.	Data Total Pegawai Negeri Sipil Pada Badan dan Unit Pelaksana (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 1.4.	Data Sarana dan Prasarana Pada Badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel 1.5.	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	31
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	33
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	34
Tabel 2.3.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	38
Tabel 2.4.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	40
Tabel 2.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026	44
Tabel 2.6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	45
Tabel 2.7.	Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	47

Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 3.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	51
Tabel 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	51
Tabel 3.3.	Realisasi Penerimaan Daerah	53
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi PAD	55
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun	57
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Di Renstra	59
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	60
Tabel 3.8.	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	64
Tabel 3.9.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	64
Tabel 3.10.	Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Sumber Dana APBD	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal.
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	19
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	26

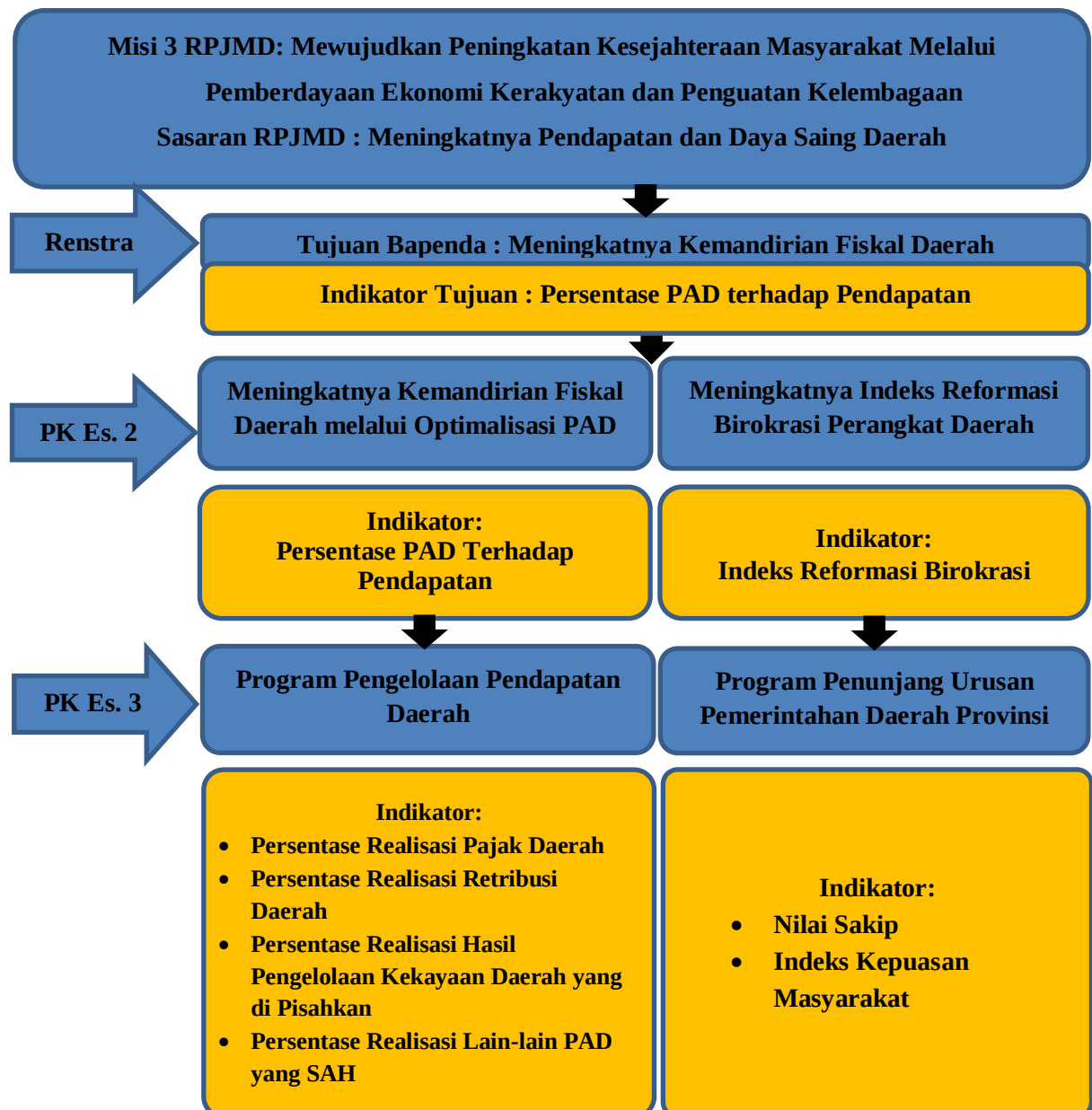
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, diuraikan dalam cascading Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. SUSUNAN ORGANISASI :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Daerah;

III. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

IV. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pelayanan Pajak Daerah, Pelayanan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain ;
- e. penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- i. penyusunan target dan realisasi penerimaan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;

- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Pajak membawahi:

1. Sub Bidang Pajak Daerah

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pajak Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pajak Daerah ;
- b. memfasilitasi Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian Pajak Daerah;
- c. melaksanakan Penelitian dan verifikasi Data pelaporan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah;
- e. melaksanakan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pemungutan pajak daerah;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan optimalisasi penerimaan PKB, BBN-KB, PAP, PAB dan opsen MBLB;
- i. menghimpun dan membuat laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan Pajak daerah serta pengembangannya;
- j. melaksanakan Penyusunan NJKB Pajak Daerah;
- k. melaksanakan pengawalan dan penghitungan terhadap pelaksanaan PBB-KB, PAJAK ROKOK dan Opsen Pajak MBLB;
- l. melakukan penghitungan dan penetapan target setiap tahun dan penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan seluruh UPT pendapatan setiap bulan ;
- m. melakukan dan menetapkan penghitungan target, lebih salur dan kurang salur atas DBH pajak daerah bagian kabupaten/Kota;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah.

2. Sub. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Uraian tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain meliputi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain dengan perangkat daerah pemungut dan instansi terkait lainnya;
- c. menyusun data potensi, mengusulkan perubahan tarif dan mengkoordinasikan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. menginventarisasi sumber penerimaan lainnya;
- e. melakukan Pendataan dan pendaftaran objek Retribusi daerah;
- f. melakukan Pengelolaan data Retribusi daerah;
- g. melakukan Penetapan wajib Retribusi daerah dan Pengelolaan retribusi daerah;
- h. melaporkan Pengelolaan Retribusi daerah;
- i. melaksanakan Sosialisasi dan konsultasi kebijakan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- j. menghimpun usulan target penerimaan dan membuat laporan Realisasi penerimaan Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- k. menyusun petunjuk pelaksanaan teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain serta penerimaan pendapatan hibah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

V. BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan jaringan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi ;
- b. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan Retribusi daerah serta memberikan analisa regulasi pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- e. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- f. pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak ;
- g. pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada SKPD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

- l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:

1. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi

Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pelaporan Data dan Informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan pelayanan dan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis ternologi pada pelaporan data dan Informasi;
- c. melakukan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
- d. melakukan pengolahan dan pemeliharaan sistem jaringan dan server jaringan;
- e. menyusun dan merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah pada pelaporan data dan Informasi;
- f. melakukan penyiapan, pengelolaan, pengembangan data dan informasi, pemeliharaan, pembinaan dan koordinasi dengan UPT Badan dan Unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan pelaporan data dan informasi;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang bidang teknologi dan sistem informasi pada pelaporan data dan informasi;
- h. membuat laporan, mengelola dan menganalisis serta mendokumentasikan data pendapatan daerah untuk disajikan dalam bentuk format laporan maupun bentuk informasi lainnya;
- i. melakukan Kerjasama dengan penyedia jasa (provider) telekomunikasi dan teknologi informasi;
- j. melakukan pengolahan data objek dan subjek pajak untuk verifikasi dan validasi data, baik secara administrasi maupun penelitian lapangan dan menyajikannya dalam berita acara;

- k. mengkoordinasikan hasil validasi data objek dan subjek pajak dengan pihak-pihak terkait dalam rangka updating data;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi.

2. Sub. Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi

Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
- b. melakukan pengembangan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi pengolahan data elektronik, dan penyajian informasi Publik;
- c. melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi di setiap UPT Badan dan Unit kerja terkait dengan pelaksanaan infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi, verifikasi, validasi objek dan subjek data;
- d. menyiapkan Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. menangani laporan pengaduan dan mengkoordinasikan serta menindaklanjuti pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi dan pengolahan data;
- f. melakukan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi;
- g. melakukan koordinasi pengamanan sistem database dan pemutakhiran database dengan menggunakan data yang bersumber dari Sub Bidang Pelaporan data dan Informasi;

- h. melakukan backup database pada data center dan pengecekan terhadap backup database pada setiap UPT Badan;
- i. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan arus data, integrasi data, pertukaran informasi dan instansi terkait;
- j. membuat strategi pengelolaan perangkat lunak aplikasi yang holistic spesifikasi dan struktur dari sistem basis data, terpadu dan terintegrasi;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi.

VI. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah dan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan melakukan analisis regulasi dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan Retribusi daerah, dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;

- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan Retribusi bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- k. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengolahan Data membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan pendapatan daerah;
- c. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
- e. menyusun perencanaan dan inovasi dalam rangka pengembangan potensi Pajak daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain

- f. menyusun perencanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota terkait optimalisasi penerimaan DBH Pajak Daerah dan optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Daerah;
- g. menyusun Perencanaan kegiatan sinergitas pemungutan opsen Pajak Daerah;
- h. melakukan Konsultasi kebijakan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- i. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan target dan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap triwulan dan tahunan;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan dengan pihak dan unit terkait;
- k. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah ;
- b. melakukan penggalian dan pemetaan potensi pendapatan yang menjadi sumber pendapatan daerah;
- c. melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah;
- d. melakukan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah;
- e. melakukan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
- f. melakukan Analisa dan pengembangan Pendapatan lain-lain serta penyusunan kebijakan Pendapatan Lain-lain;

- g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat; Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- h. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan lain-lain kepada masyarakat;
- i. menyiapkan bahan evaluasi/Fasilitasi rancangan peraturan daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. melakukan koordinasi, konsultasi pengembangan potensi dengan instansi terkait dan menyusun Produk Hukum Daerah di bidang pendapatan daerah;
- k. menyusun dan merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi dan penataan kerjasama yang terkait dengan Pendapatan daerah;
- m. merumuskan dan menyusun standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat.

VII. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas Pelaksanaan perumusan kebijakan, Pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi intensifikasi Pajak daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;

- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan Evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah dan Retribusi daerah kepada masyarakat pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan Pemeriksaan pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi:

1. Sub. Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja kegiatan sub bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian pemeriksaan, monitoring dan Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan pelayanan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain lainlain;
- e. melaksanakan monitoring, sinkronisasi regulasi pendapatan dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- g. melakukan pemeriksaan pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah;
- h. melakukan pembinaan, pengendalian dan pemeriksaan menyangkut keuangan, aset dan personil pada lingkup Badan Pendapatan Daerah dan UPT Badan;
- i. menindaklanjuti hasil temuan internal dan eksternal laporan wajib pajak dan aduan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan, pengawasan dan

pengendalian sistim Administrasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

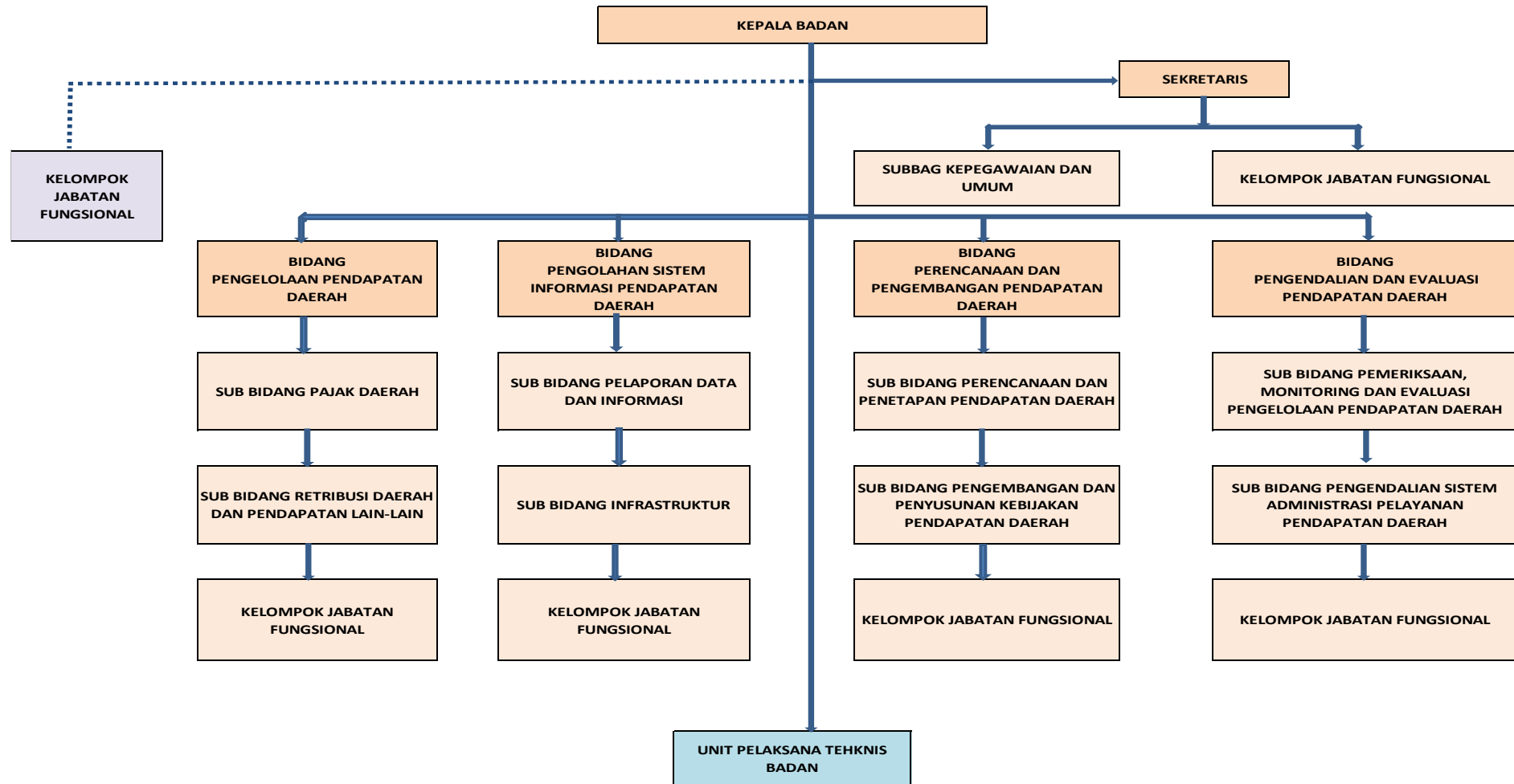
Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pengendalian sistim Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi daerah;
- d. melakukan pengendalian, evaluasi dan pembinaan teknis sistim administrasi atas distribusi dan penggunaan dokumen pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan daerah yang berbasis teknologi;
- f. melakukan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan sistim administrasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- i. melakukan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka efektifnya pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan dan monitoring;
- j. melakukan Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- k. melakukan pemberdayaan tugas dan fungsi PPNS dalam rangka penegakan hukum/ pengendalian pemungutan.
- l. meneliti kebenaran tata cara penggunaan dan pengisian dokumen administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



VIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, maka UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. UPT Pendapatan Wilayah I Kota Palu;
2. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong;
3. UPT Pendapatan Wilayah III Poso;
4. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali;
5. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai;
6. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan;
7. UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli;
8. UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol;
9. UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Unauna;
10. UPT Pendapatan Wilayah X Banawa;
11. UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi;
12. UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara;
13. UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut.

Dalam pelaksanaannya UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara dan UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut masih dalam proses pembentukan.

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh 7 (tujuh) Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, 2 (dua) SAMSAT Corner dan 1 (satu) SAMSAT Digital, yaitu:

1. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya;
2. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonodale;
3. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili;
4. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan;

5. UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Lempe;
dan
6. UPT Pendapatan Wilayah X Donggala Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe;
7. SAMSAT Point Wani
8. SAMSAT Corner Thamrin
9. SAMSAT Corner Songgolangi
10. SAMSAT Digital & Drive-Thru Bambaru

UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan, pelaksanaan kebijakan penetapan, penagihan dalam pelayanan pemungutan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan opsen Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas UPT Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan dan operasional teknis, penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. pendistribusian tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- c. penyelenggaraan teknis operasional penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- d. pelaksanaan evaluasi tugas penatausahaan penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya
- e. pelaksanaan koordinasi koordinasi dengan Instansi teknis lainnya
- f. penataan pelaksanaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor dan opsen Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan bersama Kabupaten/Kota
- g. pelaporan pelaksanaan penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a. Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Usaha;
- c. Melakukan pendataan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPT Pendapatan meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARIS/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- e. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pendapatan;
- f. Membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;
- g. Membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPT Pendapatan meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
- h. Membuat laporan penerimaan Pajak Daerah secara umum;
- i. Membuat laporan material dan non material;
- j. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, dan
- l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pendapatan.

b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Seksi PKB dan BBN-KB, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan ,penetapan, penagihan, pemungutan, serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Uraian tugas Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi PKB dan BBN-KB;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Melaksanakan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah melalui mekanisme Samsat;
- e. Melaksanakan penagihan pajak daerah
- f. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
- g. Melakukan sosialisasi terkait pajak daerah;
- h. Melaksanakan proses keberatan dan permintaan / permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor serta membuat pembukuan dan pelaporan;
- i. Melaksanakan proses Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Mutasi Keluar Daerah Provinsi maupun Dalam Daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporan;
- j. Membuat laporan Penerimaan Pajak Daerah melalui mekanisme kesamsatan;
- k. Melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi;
- l. Melaksanakan proses permohonan perubahan dari plat dasar pribadi/hitam ke plat dasar umum/kuning dan sebaliknya;
- m. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- n. Mengoptimalkan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kerjasama dengan Kabupaten/Kota.

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- p. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Seksi Penetapan dan Penagihan

Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan Pajak Daerah dalam pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan di luar kesamsatan yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah kerjanya.

Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan meliputi:

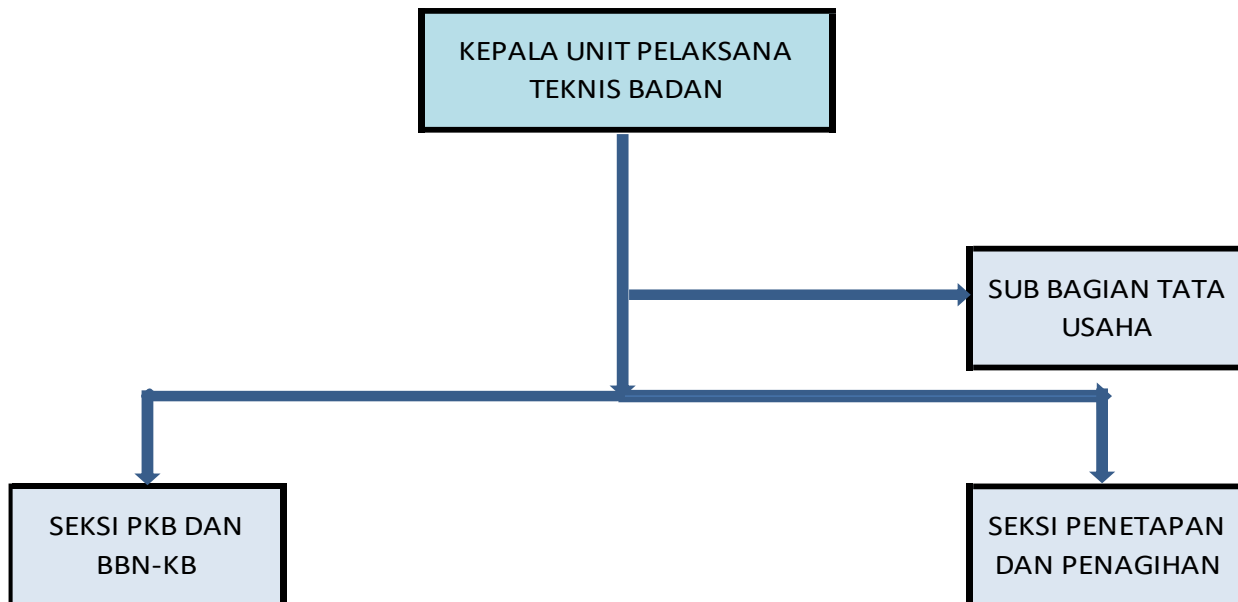
- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Penagihan Pajak;
- c. Melakukan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
- e. Melakukan penetapan wajib pajak daerah;
- f. Melakukan sosialisasi pajak daerah;
- g. Menyampaikan SKPD, SKPDLB, SKPDKB, SSPD, STPD, PAP dan PAB;
- h. Melakukan kerjasama dengan Bapenda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- i. Melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan pajak yang menjadi target UPT Badan Pendapatan selain Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bersama Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan Penataan Kendaraan dinas di lingkungan wilayah kerjanya;
- l. Membuat laporan data potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluirun penerimaan pajak (kecuali Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melaksanakan tugas-tugas pajak daerah diluar kesamsatan yang sesuai kewengana UPT Pendapatan berdasarkan ketentuan pajak dan perturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan persoalan yang menjadi beban dan tanggung-jawab yang diemban pada periode lima tahun sebelumnya dan yang akan datang dan memiliki dampak jangka panjang dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga hal tersebut perlu untuk diatasi secara bertahap. Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan dihadapi pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD.

Adapun isu-isu strategi hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi dalam pengelolaan pendapatan;
- b. Peningkatan fasilitasi pelayanan pendapatan yang memadai kepada masyarakat;

- c. Peningkatan penyelenggaraan penegelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA DAN PRASARANA

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 262 orang yang tersebar di BAPENDA Provinsi, UPT BAPENDA, Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, SAMSAT Outlet dan Corner, serta SAMSAT DIGITAL dan Drive-Thru.

Sumber Daya Aparatur pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan pada UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 40 Orang
2	GOL. II = 10 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 42 Orang
3	GOL. III = 65 Orang	SLTA = 16 Orang	
4	GOL. IV = 7 Orang	D 3 = 3 Orang	
5		S 1 = 43 Orang	
6		S 2 = 20 Orang	
	JUMLAH = 82 Orang	JUMLAH = 82 Orang	JUMLAH = 82 Orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 99 Orang
2	GOL. II = 47 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 81 Orang
3	GOL. III = 116 Orang	SLTA = 52 Orang	
4	GOL. IV = 17 Orang	D 3 = 2 Orang	
5		S 1 = 105 Orang	
6		S 2 = 20 Orang	
7		S 3 = 1 Orang	
	JUMLAH = 180 Orang	JUMLAH = 180 Orang	JUMLAH = 180 Orang

Tabel 1.3
Data Total Pegawai Negeri Sipil
Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 139 Orang
2	GOL. II = 57 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 123 Orang
3	GOL. III = 181 Orang	SLTA = 68 Orang	
4	GOL. IV = 24 Orang	D 3 = 5 Orang	
5		S 1 = 148 Orang	
6		S 2 = 40 Orang	
7		S 3 = 1 Orang	
	JUMLAH = 262 Orang	JUMLAH = 262 Orang	JUMLAH = 262 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	STATUS
1	2	3	4
1	Gedung Kantor Badan	1 Unit	Milik
2	Gedung Kantor UPT Pendapatan		
	a. UPT Pendapatan Wil I Kota Palu	1 Unit	Milik
	b. UPT Pendapatan Wil II Parigi Moutong	1 Unit	Milik
	c. UPT Pendapatan Wil III Poso	1 Unit	Milik
	d. UPT Pendapatan Wil IV Morowali	1 Unit	Milik
	e. UPT Pendapatan Wil V Banggai	1 Unit	Milik
	f. UPT Pendapatan Wil VI Banggai Kepulauan	1 Unit	Milik
	g. UPT Pendapatan Wil VII Tolitoli	1 Unit	Milik
	h. UPT Pendapatan Wil VIII Buol	1 Unit	Milik
	i. UPT Pendapatan Wil IX Tojo Una-Una	1 Unit	Milik
	j. UPT Pendapatan Wil X Donggala	1 Unit	Milik
	k. UPT Pendapatan Wil XI Sigi	1 Unit	Milik
3	Gedung Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu		
	a. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya	1 Unit	Milik
	b. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonedale	1 Unit	Pinjam Pakai
	c. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili	1 Unit	Sewa
	d. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan	1 Unit	Sewa
	e. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Bangkir (Lempe)	1 Unit	Milik
	f. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe	1 Unit	Milik
	g. SAMSAT Outlet Mall Pelayanan Publik	1 Unit	Pinjam Pakai
	h. SAMSAT Corner Thamrin	1 Unit	Pinjam Pakai
	i. SAMSAT Corner Songgolangi	1 Unit	Pinjam Pakai
	j. SAMSAT Point Wani	1 Unit	Sewa
	k. SAMSAT Digital & Drive-Thru Bambaru	1 Unit	Milik
4	Kendaraan Khusus Pelayanan SAMSAT Keliling	13 Unit	Milik
5	Kendaraan Operasional Roda 4	46 Unit	Milik
6	Kendaraan Operasional Roda 2	174 Unit	Milik

1.5 TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Surat Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.11.1./68/PKA/ITDA tanggal 8 Mei 2024, telah dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan :

- a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP
- b. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP
- c. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan Saran Perbaikan untuk Peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja (RENJA), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari **0 % s.d 100 %**. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memperoleh nilai sebesar **76,50 %**, sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Kementrian PAN dan RB termasuk dalam kategori **Sangat Baik (BB)**. Hal ini menunjukkan bahwa komponen Sistem AKIP yang ada sudah baik, namun sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan masih perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 700.1.2.1/110//LHP-E-AKIP/PROV/IRBAN3/2024 Tanggal : 20 JUNI 2024 oleh Inspektorat Daerah, maka hasil tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5

Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Dalam melaksanakan evaluasi internal yang berkualitas, Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi internal dengan didukung oleh daftar hadir, notulen, dan dokumentasi.	Telah di dukung dengan adanya foto dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.
2.	Melakukan reuiu internal laporan kinerja dan didokumentasikan.	Telah di dukung dengan adanya foto dokumentasi kegiatan.
3.	Membuat dokumen atau bagan crosscutling kinerja internal yag bersinggungan antara sub bidang satu dengan lainnya serta bidang satu dengan bidang lainnya.	Hasil rokomendasi ini akan segera ditindaklanjuti dan dilakukan crosscutling, apabila adanya crosscutling sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan kami dalam peningkatan penilaian AKIP.
4.	Membuat laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan dan di dokumentasikan.	Telah dilakukan reuiu Laporan Kinerja per triwulan oleh Bapedda melalui pengisian form matriks evaluasi capaian tahun 2023.
5.	Laporan kinerja dapat menginformasikan realisasi capaian kinerja dari rencana aksi kinerja.	Hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan menjadi perhatian kami untuk ditindak lanjuti, terutama dengan dibuatnya laporan realisasi capaian kinerja dari rencana aksi kinerja. Rekomendasi yang disajikan dalam LHE dimaksud akan menjadi salah satu dasar pertimbangan kami, sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP.

6.	Membuat pedoman teknis atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI)	Hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan menjadi perhatian kami untuk ditindak lanjuti, terutama dengan membuat pedoman teknis atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI). Rekomendasi yang disajikan dalam dokumen LHE dimaksud akan menjadi salah satu dasar pertimbangan kami, sehingga terjadi peningkatan penilaian.
----	---	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penetapan rumusan Tujuan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Misi Ketiga kepala daerah terpilih, yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”** dengan rumusan tujuan terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran; meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan
2.	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah	a. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi Sumber Penerimaan Daerah Lainnya

Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi pembangunan yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” adalah untuk mendukung Misi ke - 3.

Misi ke - 3 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan strategi :

- Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah Pajak dan Retribusi
- Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Inventarisasi Sumber Penerimaan Daerah Lainnya.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Program dan Kegiatan berdasarkan unit kerja di BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

A. Badan Pendapatan Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penagihan Pajak Daerah

Adapun uraian Struktur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Melalui penerapan program-program khususnya di program penunjang ini, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dan tentunya berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah dengan optimalisasi penerimaan pajak yang lebih baik. Dan juga program pengelolaan pendapatan daerah di Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan, memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sulteng.

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.941.604.665,00	4.428.694.415,00	487.089.750,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.941.604.665,00	4.428.694.415,00	487.089.750,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.941.604.665,00	4.428.694.415,00	487.089.750,00
		- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	505.552.500,00	505.552.500,00	-
		- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	427.165.450,00	427.165.450,00	-
		- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	376.331.750,00	376.331.650,00	(100,00)
		- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	97.550.000,00	125.410.000,00	27.860.000,00
		- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	526.523.250,00	690.379.250,00	163.856.000,00
		- Penetapan Wajib Pajak Daerah	535.312.000,00	575.312.000,00	40.000.000,00
		- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	194.714.000,00	234.350.000,00	39.636.000,00
		- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	194.562.800,00	269.286.800,00	74.724.000,00
		- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.882.000,00	37.882.000,00	-
		- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	385.284.675,00	435.284.675,00	50.000.000,00
		- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	460.726.190,00	510.726.190,00	50.000.000,00
		- Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	200.000.050,00	241.013.950,00	41.013.900,00
2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	1.165.464.350,00	1.489.095.350,00	323.631.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.165.464.350,00	1.489.095.350,00	323.631.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.165.464.350,00	1.489.095.350,00	323.631.000,00
		- Penagihan Pajak Daerah	1.165.464.350,00	1.489.095.350,00	323.631.000,00
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	519.841.901,00	549.901.901,00	30.060.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	519.841.901,00	549.901.901,00	30.060.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	519.841.901,00	549.901.901,00	30.060.000,00
		- Penagihan Pajak Daerah	519.841.901,00	549.901.901,00	30.060.000,00
4	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	541.013.678,00	623.979.678,00	82.966.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	541.013.678,00	623.979.678,00	82.966.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	541.013.678,00	623.979.678,00	82.966.000,00
		- Penagihan Pajak Daerah	541.013.678,00	623.979.678,00	82.966.000,00

1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	801.036.000,00	807.886.049,00	6.850.049,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	801.036.000,00	807.886.049,00	6.850.049,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	801.036.000,00	807.886.049,00	6.850.049,00
		- Penagihan Pajak Daeah	801.036.000,00	807.886.049,00	6.850.049,00
6	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	629.242.962,00	804.242.962,00	175.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	629.242.962,00	804.242.962,00	175.000.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	629.242.962,00	804.242.962,00	175.000.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	629.242.962,00	804.242.962,00	175.000.000,00
7	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan	902.487.467,00	985.487.467,00	83.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	902.487.467,00	985.487.467,00	83.000.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	902.487.467,00	985.487.467,00	83.000.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	902.487.467,00	985.487.467,00	83.000.000,00
8	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli	587.923.580,00	657.245.372,00	69.321.792,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	587.923.580,00	657.245.372,00	69.321.792,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	587.923.580,00	657.245.372,00	69.321.792,00
		- Penagihan Pajak Daeah	587.923.580,00	657.245.372,00	69.321.792,00
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	289.002.800,00	341.392.800,00	52.390.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	289.002.800,00	341.392.800,00	52.390.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	289.002.800,00	341.392.800,00	52.390.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	289.002.800,00	341.392.800,00	52.390.000,00
10	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una	645.539.800,00	720.539.800,00	75.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	645.539.800,00	720.539.800,00	75.000.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	645.539.800,00	720.539.800,00	75.000.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	645.539.800,00	720.539.800,00	75.000.000,00
11	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	383.188.093,00	459.826.093,00	76.638.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	383.188.093,00	459.826.093,00	76.638.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	383.188.093,00	459.826.093,00	76.638.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	383.188.093,00	459.826.093,00	76.638.000,00
12	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	356.856.000,00	481.128.000,00	124.272.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	356.856.000,00	481.128.000,00	124.272.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	356.856.000,00	481.128.000,00	124.272.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	356.856.000,00	481.128.000,00	124.272.000,00

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	87.123.151.447,00	98.964.271.741,37	11.841.120.294,37
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.181.546.782	98.964.271.741	15.782.724.959,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.389.765,00	3.009.040.330,00	258.650.565,00
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	528.441.265,00	599.837.830,00	71.396.565,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.221.948.500,00	2.409.202.500,00	187.254.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.680.249.268,00	66.929.555.391,00	3.249.306.123,00
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.680.249.268,00	66.929.555.391,00	3.249.306.123,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	999.942.065,00	1.145.208.991,00	145.266.926,00
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	156.812.050,00	156.812.050,00	-
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	250.772.550,00	350.772.300,00	99.999.750,00
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	254.624.650,00	254.624.500,00	(150,00)
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	289.665.465,00	289.665.465,00	-
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48.067.350,00	93.334.676,00	45.267.326,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.338.633.050,00	1.384.111.800,00	45.478.750,00
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	958.538.800,00	1.001.832.000,00	43.293.200,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	326.308.000,00	272.776.000,00	(53.532.000,00)
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	53.786.250,00	109.503.800,00	55.717.550,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.689.439.332,00	2.345.440.132,00	656.000.800,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.886.509,00	347.465.759,00	67.579.250,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	342.680.000,00	668.711.550,00	326.031.550,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	801.872.873,00	1.019.132.873,00	217.260.000,00
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	264.999.950,00	310.129.950,00	45.130.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.062.681.650	14.170.616.046	7.107.934.396,00
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.538.561.800	1.538.561.800,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.062.681.650	12.632.054.246	5.569.372.596,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.037.986.771	3.899.946.771	(138.040.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.037.986.771	3.899.946.771	(138.040.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.622.224.881	1.651.657.865	29.432.984,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	64.564.881	64.564.881	-
	- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

1	2	3	4	5
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.220.000,00	617.220.000,00	-
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	969.872.984,00	969.872.984,00	-
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	3.482.351.254,00	4.070.051.020,00	587.699.766,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.316.886.904,00	2.580.955.770,00	264.068.866,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.301.296.760,00	1.454.485.270,00	153.188.510,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.301.296.760,00	1.454.485.270,00	153.188.510,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.000.144,00	864.630.500,00	118.630.356,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	746.000.144,00	864.630.500,00	118.630.356,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.590.000,00	261.840.000,00	(7.750.000,00)
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.590.000,00	261.840.000,00	(7.750.000,00)
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	1.517.211.162,00	1.567.211.162,00	50.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	997.369.261,00	1.017.309.261,00	19.940.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.904.000,00	785.904.000,00	25.000.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	760.904.000,00	785.904.000,00	25.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.125.261,00	119.065.261,00	(15.060.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.125.261,00	119.065.261,00	(15.060.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.340.000,00	112.340.000,00	10.000.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.340.000,00	112.340.000,00	10.000.000,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	1.170.639.651,00	1.245.635.651,00	74.996.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	629.625.973,00	621.655.973,00	(7.970.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.897.473,00	441.997.473,00	8.100.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.897.473,00	441.997.473,00	8.100.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.548.500,00	125.678.500,00	(11.870.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.548.500,00	125.678.500,00	(11.870.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.180.000,00	53.980.000,00	(4.200.000,00)
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.180.000,00	53.980.000,00	(4.200.000,00)
5	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	1.388.951.767,00	1.443.566.029,20	54.614.262,20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	587.915.767,00	635.679.980,00	47.764.213,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.798.137,00	360.675.150,00	47.877.013,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.798.137,00	360.675.150,00	47.877.013,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.591.200,00	148.478.400,00	(20.112.800,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.591.200,00	148.478.400,00	(20.112.800,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.526.430,00	126.526.430,00	20.000.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.526.430,00	126.526.430,00	20.000.000,00

1	2	3	4	5
6	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	1.503.523.303,00	1.678.523.303,00	175.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	874.280.341,00	874.280.341,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.759.991,00	678.759.991,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	678.759.991,00	678.759.991,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.182.000,00	115.182.000,00	-
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.182.000,00	115.182.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.338.350,00	80.338.350,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.338.350,00	80.338.350,00	-
7	UPT Pendapatan Wil. VI Banggai Kepulauan	1.347.727.101,00	1.471.777.101,00	124.050.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	445.239.634,00	486.289.634,00	41.050.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.355.834,00	334.405.834,00	34.050.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.355.834,00	334.405.834,00	34.050.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.183.800,00	87.183.800,00	10.000.000,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.183.800,00	87.183.800,00	10.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.700.000,00	67.700.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.700.000,00	67.700.000,00	-
8	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-Toli	1.263.531.535,00	1.358.731.535,00	95.200.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	675.607.955,00	701.486.163,00	25.878.208,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.961.404,00	386.161.404,00	(4.800.000,00)
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.961.404,00	386.161.404,00	(4.800.000,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.428.634,00	133.107.742,00	20.679.108,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.428.634,00	133.107.742,00	20.679.108,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.217.917,00	182.217.017,00	9.999.100,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.217.917,00	182.217.017,00	9.999.100,00
9	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	773.332.897,00	838.182.897,00	64.850.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	484.330.097,00	496.790.097,00	12.460.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.008.273,00	385.468.273,00	12.460.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.008.273,00	385.468.273,00	12.460.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.219.600,00	46.219.600,00	-
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.219.600,00	46.219.600,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.102.224,00	65.102.224,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.102.224,00	65.102.224,00	-
10	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una	1.170.275.024,00	1.245.275.024,00	75.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	524.735.224,00	524.735.224,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.501.450,00	313.501.450,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.501.450,00	313.501.450,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.143.774,00	86.143.774,00	-
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.143.774,00	86.143.774,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.090.000,00	125.090.000,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.090.000,00	125.090.000,00	-

1	2	3	4	5
11	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	1.144.635.623,00	1.223.685.623,63	79.050.000,63
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	761.447.530,00	763.859.531,00	2.412.001,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.200.000,00	443.250.000,00	1.050.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	442.200.000,00	443.250.000,00	1.050.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.197.530,00	179.579.531,00	(23.617.999,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.197.530,00	179.579.531,00	(23.617.999,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.050.000,00	141.030.000,00	24.980.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.050.000,00	141.030.000,00	24.980.000,00
12	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	1.527.483.504,00	1.627.483.504,00	100.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.170.627.504,00	1.146.355.504,00	(24.272.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.063.504,00	737.087.704,00	112.024.200,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	625.063.504,00	737.087.704,00	112.024.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.754.000,00	204.952.800,00	(199.801.200,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.754.000,00	204.952.800,00	(199.801.200,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.810.000,00	204.315.000,00	63.505.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.810.000,00	204.315.000,00	63.505.000,00

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	30,47	30,57	40	42	45
2.	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	-	-	79	-	-

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Indikator sasaran bertujuan mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan kinerja penerimaan PAD	Laporan Realisasi Pajak Daerah, dan Laporan Realisasi Bukan Pajak dan DBH Pusat Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
2.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Laporan Pelaksanaan Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat

2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan program kegiatan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong terciptanya sasaran - sasaran yang akan mempercepat terwujudnya Misi Badan Pendapatan. Tujuan utama dari program ini adalah mendukung kelancaran proses pemerintahan daerah dengan cara memperbaiki dan mengembangkan sistem administrasi, teknologi informasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bapenda.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan pajak, memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Program penunjang urusan pemerintahan daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berfokus pada pengelolaan dan optimalisasi penerimaan daerah melalui berbagai sumber pajak dan retribusi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan instansi terkait.

Program pengelolaan pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pendapatan daerah yang optimal sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulteng. Untuk mewujudkan tujuan

tersebut, program pengelolaan pendapatan daerah di Bapenda Sulteng melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dengan pendekatan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan administrasi yang lebih baik.

Adapun sasaran utama Indikator Kinerja yang diharapkan terwujud untuk tahun 2024 terlihat pada format Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan (PK)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	40 ,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	79

Sumber Dana APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Badan Pendapatan	Rp. 98.964.271.741,37	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 94.535.577.326,37	
	- Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.428.694.415,00	
2.	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	Rp. 4.070.051.120,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.580.955.770,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.489.095.350,00	
3.	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	Rp. 1.567.211.162,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.017.309.261,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 549.901.901,00	
4.	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	Rp. 1.245.635.651,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 621.655.973,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 623.979.678,00	

5.	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	Rp.	1.443.566.029,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	635.679.980,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	807.886.049,20	

1	2	3	4
6.	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	Rp. 1.678.523.303,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 874.280.341,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 804.242.962,00	
7.	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan	Rp. 1.471.777.101,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 486.289.634,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 985.487.467,00	
8.	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli	Rp. 1.358.731.535,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 701.486.163,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 657.245.372,00	
9.	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	Rp. 838.182.897,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 496.790.097,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 341.392.800,00	
10.	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una	Rp. 1.245.275.024,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 524.735.224,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 720.539.800,00	
11.	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	Rp. 1.223.685.624,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 763.859.531,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 459.826.093,00	
12.	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	Rp. 1.627.483.504,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.146.355.504,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 481.128.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahun anggaran 2024 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 5.555.588.679.378,52 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PAD Rp. 2.115.188.753.206,52
- 2) Pendapatan Transfer Rp. 3.429.876.216.802,00
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 10.523.709.370,00

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 38,07 %.

Dengan demikian perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4x100%)	7
1	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	40	38,07	95,18	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya pelayanan publik yang prima - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	83,99	106,32	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan target dan realisasi kinerja tersebut di atas, capaian realisasi indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan sebesar 38,07 % dari target capaian 40%.

Dari tabel tersebut diatas nilai capaian 95,18 % bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka nilai capaian kinerja dikategorikan sangat tinggi sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah

5	≤ 50	Sangat Rendah
---	-----------	---------------

Kemudian ada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan dari target yang di berikan. Target di tahun 2024 nilai indeksnya 79 dengan realisasi yang di capai pada tahun 2024 89,33. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Produser Pelayanan yang meningkat akan tetapi permintaan layanan lebih dipermudah tata cara pembayaran bayar Pajak tetap ada”.
- “Untuk sistem pembayaran Online agar lebih bisa digunakan dan mohon aplikasi samsat menjadi modul dalam pemberian informasi surat-surat kendaraan bermotor”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
- Penambahan Sarana dan Prasarana yang dirasa masyarakat masih Kurang

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan keuangan di bidang pendapatan sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021- 2026, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Daerah

No	Ayat Penerimaan	Realisasi		
		T.A 2022	T.A 2023	T.A 2024
1	PAD	1,535,532,842,644.95	1,719,164,510,752.63	2,115,188,753,206.52
2	PENDAPATAN TRANSFER	3,319,202,639,678.00	2,823,279,573,833.00	3,429,876,216,802.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4,736,680,037.00	5,667,305,361.00	10,523,709,370.00
Jumlah Pendapatan Daerah		4,895,472,162,359.95	4,548,111,389,946,63	5,555,588,679,378,52
Persentase PAD terhadap Pendapatan		31.37	37.87	38.07

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2024 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 jumlah pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp.347.360.772.413,32 (-7.10 %) dari tahun 2022. Dan tahun 2024 jumlah pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.1.007.477.289.431,9 (22.15%) dari tahun 2023.

Penurunan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dikarenakan menurunnya realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD merupakan sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan target dan realisasi PAD dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD

No	Rincian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pajak Daerah	1.110.000.000.000,00	1.294.028.035.420,28	116,58	1.347.241.242.844,00	1.402.239.230.951,10	104,08	1.629.000.000.000,00	1.774.182.144.129,46	108,91
2	Retribusi Daerah	14.857.250.000,00	13.134.648.510,00	88,41	21.420.497.000,00	23.347.868.082,00	109,00	17.100.594.800,00	19.497.629.593,00	114,02
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	18,98	212.100.000.000,00	51.244.848.172,00	24,16
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	279.939.819.818,00	191.979.938.879,48	68,58	310.379.043.150,00	241.165.160.746,53	77,70	393.460.617.339,00	270.264.131.312,06	68,69
	JUMLAH	1.561.939.035.510,00	1.535.532.842.644,95	98,31	1.955.221.037.883,00	1.719.164.510.752,63	87,93	2.251.661.212.139,00	2.115.188.753.206,52	93,94

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2024 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Penerimaan PAD meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Untuk tahun 2024 efektivitasnya tidak mencapai 100% yakni sebesar 93,94 %. pengukuran Efektivitas dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi dengan jumlah target Pajak Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 komponen PAD yang mempunyai efektivitas paling tinggi yakni Retribusi Daerah dengan capaian persentase efektivitas sebesar 114,02 %. Sedangkan komponen PAD yang efektivitasnya paling rendah adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan capaian sebesar 24,16 %.

Pajak daerah merupakan penerimaan yang ditangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Untuk mengukur perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30.47	31.37	102,95	30.57	37.87	123,88	40	38.07	95,18
2.	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah - Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	79	83,99	106,32

Capaian Kinerja pada tahun 2024 mencapai 95,18 % yang artinya mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 123,965 %. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.

Pada Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Dilihat dari perbandingan target yang diberikan dan realisasi yang dicapai di tahun 2024 meningkat 4,99 poin.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran Tahun 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun periode 2021-2026. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah Di Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah -Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	38,07	32,78	116,14
2.	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah -Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	-	106,32

Dilihat dari perspektif target akhir Tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,99 poin dari target sebesar 79 poin dengan capaian kinerja sebesar 106,32 persen.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional
Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Capaian Nasional /Daerah Lain %
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30,57	37,87	123,88	40	38,07	95,18	96,44 (Sulawesi Selatan) Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul "Sulawesi Selatan Catatkan Capaian Ekonomi Mengesankan di Tahun 2024". Klik untuk baca: https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/sulawesi-selatan-catatkan-capaian-ekonomi-mengesankan-di-tahun-2024 .
2.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	79	83,99	106,32	-

Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,27% dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk target yang ditetapkan pada tahun 2024 jika mengacu ke renstra Bapenda nilainya target persentase PAD terhadap pendapatan sebesar 31,30%. Hanya saja berdasarkan hasil evaluasi dari mitra Bappeda

dengan melihat capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya maka untuk tahun 2024 target persentase PAD terhadap pendapatan dinaikan menjadi 40,00% atau naik 8,7%.

Selanjutnya pada kolom capaian nasional/daerah lain yang kami masukkan disini capaian pendapatan daerah sulawesi selatan pada tahun 2024 yang mana merupakan provinsi yang ada di pulau sulawesi juga. Dijelaskan bahwa capaian pendapatan di sulawesi selatan tersebut mencatat rekor tertinggi lima tahun terakhir di sulawesi selatan, kalau dibandingkan dengan capaian di sulawesi tengah hanya berbeda sedikit. Kami mengharapkan dengan pencapaian tahun ini di sulawesi tengah bisa memberikan optimis pertumbuhan ekonomi di sulawesi tengah sehingga di tahun-tahun berikutnya peningkatan pendapatan daerah semakin meningkat.

Capaian Realisasi Persentase PAD terhadap pendapatan dibandingkan target Persentase PAD terhadap pendapatan untuk tahun 2024 sebesar 95,18% ($38,07/40 \times 100\%$). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah lebih besar daripada kontribusi PAD, yakni sebesar 61,74 %. Adapun penerimaan Pendapatan Transfer untuk tahun 2024 terdiri dari ; (1). Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1.079.362.461,- (2). Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.616.772.456.028,- (3). Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 324.621.662.908,- (4). **Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 409.119.636.866,-.**

Jika dibandingkan dengan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat Provinsi Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih tinggi 1,34 poin dari realisasi IKM Provinsi yang sebesar 82,65 poin. Nilai IKM Provinsi Tahun 2024 mengalami penurunan dari IKM Tahun 2023 sebesar 1,59 poin dari realisasi 84,24.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 Target Pendapatan sebesar Rp 6.028.674.056.639,00 dan terealisasi Pendapatan Daerah (anggaran setelah perubahan) sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp 5.555.588.679.378,52 atau 92,15% dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.115.188.753.206,52 atau 93,94% dari Target sebesar Rp. 2.251.661.212.139 dengan rincian :
- Pajak Daerah Target Rp. 1.629.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.774.182.144.129,46 atau 108,91%;
 - Retribusi Daerah Target Rp. 17.059.374.800 terealisasi sebesar Rp. 19.497.629.593,00 atau 114,29%;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Target Rp. 212.100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 51.244.848.172,00 atau 24,16% dan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target Rp. 393.501.837.339,00 terealisasi sebesar Rp. 270.264.131.312,06 atau 68,69%.
- b) Pendapatan transfer Target Sebesar Rp. 3.765.365.002.000 terealisasi sebesar Rp. 3.429.876.216.802 atau 91,09% dengan rincian :
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Target Rp. 1.377.526.265.000 terealisasi sebesar Rp. 1.079.362.461.000 atau 78,36%;
 - Dana Alokasi Umum Target Rp. 1.638.594.346.000 terealisasi sebesar Rp. 1.616.772.456.028 atau 97,67%; dan
 - Dana Alokasi Khusus Target Rp. 749.244.391.000 terealisasi sebesar Rp. 733.741.299.774 atau 97,87%.
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Target Rp. 11.647.842.500 terealisasi sebesar Rp. 10.523.709.370 atau 90,35% yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan data di atas realisasi Pajak Daerah melampaui target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak ditemui permasalahan/hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah yang meliputi:

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi terhadap keterlambatan dalam membayar pajak sehingga tidak memberi efek jera pada wajib pajak.
3. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB masih sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan dibutuhkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat.
4. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkadang tidak konsisten.

Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling (SAMKEL), Gerai Samsat Corner, serta Samsat Digital dan *Drive-Thru*
 - Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - Melaksanakan kegiatan pemasangan sticker ATT (Aksi Tempel-tempel) pada kendaraan bermotor.
 - Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia bersama antara pihak kepolisian dan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan.
2. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam samsat yaitu dari Bapenda, Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam penyelesaian proses administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar.

f. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024 sumber penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut: APBD : Pagu Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 116.734.394.591,21- (Seratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), realisasinya Rp. 110.024.256.190,00- (Seratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 94.25%.

Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Efesiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi (%) (5-8)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah -Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	40,00	38,07	95,18	116.734.394.591,21	110.024.256.190,00	94,25	0,93
2.	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah -Terwujudnya pelayanan publik yang prima	79	83,99	106,32				12,07

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian program serta sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 (satu) kegiatan. Adapun pencapaian dari sisi kinerja dan biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp	%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.349.419.887,20	12.290.008.055,00	99,52
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	104.384.974.704,10	97.725.845.635,00	93,62

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.349.419.887,20 dan telah terealisasi Rp 12.290.008.055,00 dengan hasil yang dicapai adalah 99, 52%. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp 104.384.974.704,10 dan telah terealisasi Rp 97.725.845.635,00 dengan hasil yang dicapai adalah 93,62%.

Penunjang Keberhasilan:

- Peningkatan realisasi PAD utamanya Pajak Daerah di sebabkan karena adanya perubahan regulasi tentang penyesuaian tarif PBBKB yang berlaku di tahun 2024.
- Peningkatan Digitalisasi Pelayanan Transformasi digital, dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kemudahan pelayanan memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan lebih cepat, meminimalisir antrean, dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi pegawai BAPENDA, terutama dalam hal pemahaman peraturan perpajakan dan teknologi informasi. SDM yang terlatih dapat mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan akurat. Penguatan sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan akuntabel.
- Adanya pengawasan yang baik dapat mendorong pengelolaan anggaran dan pendapatan yang lebih efisien. dan juga Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kampanye pajak yang intensif dan edukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakan dapat mendukung capaian IKU.
- Pemberian insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor disambut dengan baik oleh masyarakat melalui Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024.
- dan terakhir Adanya pengembangan layanan SAMSAT yang pembayarannya secara online / nontunai seperti E- Samsat / SIGNAL (Layanan Samsat Digital Nasional) dan Qris.
- Kemudian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Inovasi pembayaran pajak daerah secara online, memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui tatap muka dengan petugas.

Penghambat :

Gangguan teknis pada sistem digital yang digunakan untuk pengelolaan pajak dapat mengurangi kenyamanan pengguna dan berpotensi menurunkan

tingkat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi yang sesuai dengan peraturan. Ini disebabkan oleh kurangnya edukasi perpajakan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana yang diterima oleh pemerintah daerah. Krisis ekonomi atau bencana alam dapat menurunkan pendapatan daerah karena menurunnya aktivitas ekonomi atau ketidakmampuan masyarakat dan sektor bisnis untuk membayar pajak dan retribusi. Capaian IKU BAPENDA pada tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yang memfasilitasi efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur, SDM, serta rendahnya kepatuhan pajak perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal. Dan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah melalui berbagai macam sarana pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH					98.964.271.741,37		87.626.865.066,85		88,54
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					94.535.577.326,37		86.990.824.298,00		92,02
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.009.040.330,17	3	2.110.923.448,00	100	70,15
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	599.837.830,17	3	578.343.948,00	100	96,42
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.409.202.500,00	1	1.532.579.500,00	100	63,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	66.929.555.391,20	12	61.143.094.265,00	100	91,35
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	270	66.929.555.391,20	270	61.143.094.265,00	100	91,35
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1.145.208.991,00	1	1.030.344.388,00	100	89,97
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	156.812.050,00	2	139.820.352,00	100	89,16
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Analisa dan terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	2	350.772.300,00	2	349.174.300,00	100	99,54
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	254.624.500,00	1	254.195.080,00	100	99,83
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	289.665.465,00	4	287.154.656,00	100	99,13
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					93.334.676,00		93.315.538,00		99,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKM	Laporan	1	1.384.111.800,00	1	1.343.035.978,00	100	95,54
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1.001.832.000,00	1	968.458.000,00	100	96,67
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	272.776.000,00	3	265.074.178,00	100	97,18
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	50	109.503.800,00	50	109.503.800,00	100	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen/Laporan	18	2.345.440.132,00	18	1.957.717.028,00	100	83,47
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	347.465.759,00	6	292.943.800,00	100	84,31
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	668.711.550,00	3	664.852.000,00	100	99,42
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.019.132.873,00	4	999.921.228,00	100	98,11
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					310.129.950,00		290.829.610,00		93,78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	14.170.616.046,00	12	13.895.907.345,00	100	98,06
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	1.538.561.800,00	9	1.494.260.000,00	100	97,12
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12.632.054.246,00	12	12.401.647.345,00	100	98,18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	3.899.946.771,00	1	3.868.294.396,00	100	99,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	3.899.946.771,00	1	3.868.294.396,00	100	99,19
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	3.899.946.771,00	1	3.868.294.396,00	100	99,19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.651.657.865,00	1	1.641.507.450,00	100	99,39
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Paket	2	64.564.881,00	2	29.460.600,00	100	45,63
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	617.220.000,00	4	78.049.000,00	100	12,65
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Paket	8	969.872.984,00	8	967.735.000,00	100	99,78
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.428.694.415,00		3.368.906.639,00		76,07
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	4.428.694.415,00	1	3.368.906.639,00	100	76,07
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	9	505.552.450,00	9	485.030.100,00	100	95,94
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	427.165.450,00	1	426.893.025,00	100	99,94
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Laporan	690.379.250,00	Laporan	689.280.421,00		99,84
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	16	575.312.000,00	16	570.643.784,00	100	99,19
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	16	269.286.800,00	16	268.532.956,00	100	99,72
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Laporan	1 1	435.284.675,00	1 1	435.216.995,00	100	99,98
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	510.726.190,00	1	493.309.358,00	100	96,59
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					376.331.650,00		376.136.554,00		99,95
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					125.410.000,00		125.256.720,00		99,88
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					234.350.000,00		234.226.257,00		99,95
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					37.882.000,00		37.493.000,00		98,97
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					241.013.950,00		240.341.800,00		99,72
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu					4.070.051.020,00		3.364.741.611,00		82,67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.580.955.770,00		2.216.602.599,00		85,88
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	1.454.485.270,00	1	1.288.052.650,00	100	88,56
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1.454.485.270,00	3	1.288.052.650,00	100	88,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	864.630.500,00	5	863.215.044,00	100	99,84
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	864.630.500,00	1	863.215.044,00	100	99,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	261.840.000,00	1	260.747.600,00	100	99,88
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	261.840.000,00	3	260.747.600,00	100	99,88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.489.095.250,00		1.489.095.250,00	100	99,22
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	Persen(100)	100	1.489.095.250,00	100	1.489.095.250,00	100	99,22
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1.489.095.250,00	1	1.489.095.250,00	100	99,22
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong					1.567.211.162,00		1.547.398.184,00	99	98,11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.017.309.261,00		883.388.626,00	87	97,10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	785.904.000,00	1	671.904.000,00	85	80,03
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	785.904.000,00	3	671.904.000,00	85	80,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	119.065.261,00	5	107.226.426,00	90	100,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	119.065.261,00	1	107.226.426,00	90	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	112.340.000,00	1	104.258.200,00	93	97,70
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5	112.340.000,00	5	104.258.200,00	93	97,70
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					549.901.901,00		549.824.850,00	100	100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	549.901.901,00	1	549.824.850,00	100	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	549.901.901,00	1	549.824.850,00	100	100,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso					1.245.635.651,00		1.242.535.681,00	100	99,75
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					621.655.973,00		553.006.643,00	89	99,52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	441.997.473,00	1	380.456.100,00	86	99,88
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	441.997.473,00	5	380.456.100,00	86	86,08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	125.678.500,00	5	120.679.843,00	96	96,02
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	125.678.500,00	1	120.679.843,00	96	96,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	53.980.000,00	1	51.870.700,00	100	96,09
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	6	53.980.000,00	6	51.870.700,00	100	96,09
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					623.979.678,00		623.662.000,00		99,95
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	623.979.678,00	1	623.662.000,00	100	99,95
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	623.979.678,00	1	623.662.000,00	100	99,95
5	UPT Pendapatan Wil. IV Morowali					1.443.566.029,00		1.407.145.789,00		97,48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					635.679.980,00		600.775.789,00		94,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	360.675.150,00	1	362.680.778,00	100	100,56
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	360.675.150,00	3	362.680.778,00	100	100,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	148.478.400,00	1	113.431.111,00	100	76,40
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	148.478.400,00	1	113.431.111,00	100	76,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	126.526.430,00	1	124.663.900,00	100	98,53
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	6	126.526.430,00	6	124.663.900,00	100	98,53
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					807.886.049,00		806.370.000,00		99,81
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	807.886.049,00	1	806.370.000,00	100	99,81
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	807.886.049,00	1	806.370.000,00	100	99,81
6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai					1.678.523.303,00		729.788.678,00		43,48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					874.280.341,00		729.714.110,00		83,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	678.759.991,00	1	562.348.500,00	100	82,85
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	678.759.991,00	2	562.348.500,00	100	82,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	115.182.000,00	1	88.347.810,00	100	76,70
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	115.182.000,00	1	88.347.810,00	100	76,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	80.338.350,00	1	74.568.000,00	100	92,82
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	80.338.350,00	1	74.568.000,00	100	92,82
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					804.242.962,00		803.561.400,00		99,92
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	804.242.962,00	1	803.561.400,00	100	99,92
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	804.242.962,00	1	803.561.400,00	100	99,92
7	UPT Pendapatan Wil. VI Bangkep					1.471.777.101,00		1.418.311.913,00		96,37
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					486.289.634,00		433.086.913,00		89,06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	334.405.834,00	1	289.097.500,00	100	86,45
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	334.405.834,00	3	289.097.500,00	100	86,45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	87.183.800,00	1	80.498.913,00	100	92,33
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	87.183.800,00	1	80.498.913,00	100	92,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	64.700.000,00	1	63.490.500,00	100	98,13
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	64.700.000,00	1	63.490.500,00	100	98,13
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					985.487.467,00		985.225.000,00		99,97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	985.487.467,00	1	985.225.000,00	100	99,97
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	985.487.467,00	1	985.225.000,00	100	99,97
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-Toli					1.358.731.535,00		1.283.142.027,00		94,44
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					701.486.163,00		625.969.877,00		89,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	386.161.404,00	1	315.744.550,00	100	81,76
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	386.161.404,00	3	315.744.550,00	100	81,76
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	133.107.742,00	1	133.503.452,00	100	100,30
	- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	133.107.742,00	1	133.503.452,00	100	100,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	182.217.017,00	1	176.721.875,00	100	96,33
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	182.217.017,00	3	176.721.875,00	100	96,33
	PROGRAM PENGELOLAAN					657.245.372,00		657.172.150,00		99,95
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	657.245.372,00	1	657.172.150,00	100	99,95
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	657.245.372,00	1	657.172.150,00	100	99,95
9	UPT Pendapatan Wil. VIII Buol					838.182.897,00		746.484.205,00		93,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					496.790.097,00		262.040.955,00		83,82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	385.468.273,00	1	312.210.950,00	100	77,25
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	385.468.273,00	3	312.210.950,00	100	77,25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	46.219.600,00	1	40.018.743,00	100	90,83
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	46.219.600,00	5	40.018.743,00	100	90,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	65.102.224,00	1	61.694.400,00	100	100,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	5	65.102.224,00	5	61.694.400,00	100	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					341.392.800,00		334.670.800,00		99,74
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	341.392.800,00	1	334.670.800,00	100	99,74
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	341.392.800,00	1	334.670.800,00	100	99,74
10	UPT Pendapatan Wil. IX Tojo Una-Una					1.245.275.024,00		1.700.602.625,00		99,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					524.735.224,00		980.288.125,00		99,03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	313.501.450,00	1	268.624.150,00	100	98,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	313.501.450,00	3	268.624.150,00	100	98,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	86.143.774,00	1	83.394.725,00	100	100,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	86.143.774,00	1	83.394.725,00	100	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	125.090.000,00	1	119.881.700,00	100	95,84
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	125.090.000,00	3	119.881.700,00	100	95,84
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					720.539.800,00		720.314.500,00		99,97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	720.539.800,00	1	720.314.500,00	100	99,97
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	720.539.800,00	1	720.314.500,00	100	99,97
11	UPT Pendapatan Wil. X Donggala					1.223.685.624,00		1.146.834.825,00		93,72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					763.859.531,00		721.549.975,00		94,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	443.250.000,00	1	370.050.000,00	100	83,49
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	443.250.000,00	5	370.050.000,00	100	83,49
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	179.579.531,00	5	179.461.243,00	100	99,93
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	179.579.531,00	1	179.461.243,00	100	99,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	141.030.000,00	1	140.252.800,00	100	99,45
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	141.030.000,00	4	140.252.800,00	100	99,45
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					459.826.093,00		459.775.800,00		99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	459.826.093,00	1	459.775.800,00	100	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	459.826.093,00	1	459.775.800,00	100	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	UPT Pendapatan Wil. XI Sigi					1.627.483.504,00		1.469.956.211,00		90,32
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					1.146.355.504,00		991.760.151,00		86,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	737.087.704,00	1	626.400.490,00	100	84,98
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	737.087.704,00	4	626.400.490,00	100	84,98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	204.952.800,00	5	178.143.461,00	100	86,92
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	204.952.800,00	1	178.143.461,00	100	86,92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	204.315.000,00	1	187.216.200,00	100	91,63
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	204.315.000,00	4	187.216.200,00	100	91,63
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN					481.128.000,00	1	478.196.060,00		99,39
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	481.128.000,00	1	478.196.060,00	100	99,39
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	481.128.000,00	1	478.196.060,00	100	99,39

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan :

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 Sumber Dana APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	94.535.577.326,37	89.840.605.768,00	95,03
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94.535.577.326,37	85.458.244.798,00	90,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.009.040.330,00	2.899.581.548,00	96,36
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	599.837.830,00	578.343.948,00	96,42
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.409.202.500,00	2.321.237.600,00	96,35
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.929.555.391,00	61.143.094.265,00	91,35
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.929.555.391,00	61.143.094.265,00	91,35
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.145.208.991,00	1.123.657.926,00	98,12
-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	156.812.050,00	139.820.352,00	89,16
-	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	350.772.300,00	349.172.300,00	99,54
-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	254.624.500,00	254.195.080,00	99,83
-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	289.665.465,00	287.154.656,00	99,13
-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	93.334.676,00	93.315.538,00	99,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.384.111.800,00	1.343.035.978,00	95,54
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.001.832.000,00	968.458.000,00	96,67
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	272.776.000,00	265.074.178,00	97,18
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109.503.800,00	109.503.800,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.345.440.132,00	2.300.690.688,00	98,09
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.465.759,00	345.087.850,00	99,32
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	668.711.550,00	664.852.000,00	99,42
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.019.132.873,00	999.921.228,00	98,11
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	310.129.950,00	290.829.610,00	93,78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.170.616.046,00	13.895.905.345,00	98,06
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.538.561.800,00	1.494.260.000,00	97,12
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.632.054.246,00	12.401.645.345,00	98,18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.899.946.771,00	3.868.294.396,00	99,19
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.899.946.771,00	3.868.294.396,00	99,19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.651.657.865,00	29.460.600,00	1,78
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.564.881,00	29.460.600,00	45,63

1	2	3	4	5
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.220.000,00	584.030.550,00	94,62
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	969.872.984,00	967.735.000,00	99,78
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.428.694.415,00	4.382.360.970,00	98,95
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.428.694.415,00	4.382.360.970,00	98,95
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	505.552.450,00	485.030.100,00	95,94
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	427.165.450,00	426.893.025,00	99,94
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	690.379.250,00	689.280.421,00	99,84
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	575.312.000,00	570.643.784,00	99,19
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	269.286.800,00	268.532.956,00	99,72
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	435.284.675,00	435.216.995,00	99,98
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	510.726.190,00	493.309.358,00	96,59
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	376.331.650,00	376.136.554,00	99,95
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	125.410.000,00	125.256.720,00	99,88
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	234.350.000,00	234.226.257,00	99,95
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.882.000,00	37.493.000,00	98,97
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	241.013.950,00	240.341.800,00	99,72
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	4.070.051.020,00	3.901.110.544,00	95,85
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.580.955.770,00	2.412.015.294,00	93,45
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.454.485.270,00	1.288.052.650,00	88,56
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.454.485.270,00	1.288.052.650,00	88,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.630.500,00	863.215.044,00	99,84
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	864.630.500,00	863.215.044,00	99,84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.840.000,00	260.747.600,00	99,58
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.840.000,00	260.747.600,00	99,58
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.489.095.250,00	1.489.095.250,00	100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.489.095.250,00	1.489.095.250,00	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	1.489.095.250,00	1.489.095.250,00	100,00
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	1.567.211.162,00	1.433.213.476,00	91,45
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.017.309.261,00	883.388.626,00	86,84
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.904.000,00	671.904.000,00	85,49
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	785.904.000,00	671.904.000,00	85,49
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.065.261,00	107.226.426,00	90,06
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.065.261,00	107.226.426,00	90,06
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.340.000,00	104.258.200,00	92,81
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.340.000,00	104.258.200,00	92,81
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	549.901.901,00	549.824.850,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	549.901.901,00	549.824.850,00	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	549.901.901,00	549.824.850,00	99,99
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	1.245.635.651,00	1.176.668.643,00	94,46
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	621.655.973,00	553.006.643,00	88,96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.997.473,00	380.456.100,00	86,08

1	2	3	4	5
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.997.473,00	380.456.100,00	86,08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.678.500,00	120.679.843,00	96,02
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.678.500,00	120.679.843,00	96,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.980.000,00	51.870.700,00	96,09
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.980.000,00	51.870.700,00	96,09
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	623.979.678,00	623.662.000,00	99,95
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	623.979.678,00	623.662.000,00	99,95
	- Penagihan Pajak Daerah	623.979.678,00	623.662.000,00	99,95
5	UPT Pendapatan Wil. IV Morowali	1.443.566.029,00	1.407.145.789,00	97,48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	635.679.980,00	600.775.789,00	94,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.675.150,00	362.680.778,00	100,56
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.675.150,00	362.680.778,00	100,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.478.400,00	113.431.111,00	76,40
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.478.400,00	113.431.111,00	76,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.526.430,00	124.663.900,00	98,53
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.526.430,00	124.663.900,00	98,53
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	807.886.049,00	806.370.000,00	99,81
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	807.886.049,00	806.370.000,00	99,81
	- Penagihan Pajak Daerah	807.886.049,00	806.370.000,00	99,81
6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai	1.678.523.303,00	1.528.825.710,00	91,08
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	874.280.341,00	725.264.310,00	82,96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.759.991,00	562.348.500,00	82,85
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	678.759.991,00	562.348.500,00	82,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.182.000,00	88.347.810,00	76,70
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.182.000,00	88.347.810,00	76,70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.338.350,00	74.568.000,00	92,82
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.338.350,00	74.568.000,00	92,82
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	804.242.962,00	803.561.400,00	99,92
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	804.242.962,00	803.561.400,00	99,92
	- Penagihan Pajak Daerah	804.242.962,00	803.561.400,00	99,92
7	UPT Pendapatan Wil. VI Bangkep	1.471.777.101,00	1.418.311.913,00	96,37
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	486.289.634,00	433.086.913,00	89,06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.405.834,00	289.097.500,00	86,45
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.405.834,00	289.097.500,00	86,45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	87.183.800,00	80.498.913,00	92,33
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	87.183.800,00	80.498.913,00	92,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.700.000,00	63.490.500,00	98,13
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.700.000,00	63.490.500,00	98,13
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	985.487.467,00	985.225.000,00	99,97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	985.487.467,00	985.225.000,00	99,97
	- Penagihan Pajak Daerah	985.487.467,00	985.225.000,00	99,97

1	2	3	4	5
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-Toli	1.198.276.260,00	1.465.383.125,00	122,29
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	701.486.163,00	808.210.975,00	115,21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.161.404,00	315.744.550,00	81,76
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	386.161.404,00	315.744.550,00	81,76
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.161.404,00	315.744.550,00	81,76
	- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.107.742,00	133.503.452,00	100,30
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.217.017,00	176.721.875,00	96,98
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.217.017,00	176.721.875,00	96,98
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	657.245.372,00	657.172.150,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	657.245.372,00	657.172.150,00	99,99
9	- Penagihan Pajak Daerah	657.245.372,00	657.172.150,00	99,99
	UPT Pendapatan Wil. VIII Buol	838.182.897,00	748.594.893,00	89,31
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	496.790.097,00	413.924.093,00	83,32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.468.273,00	312.210.950,00	81,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	385.468.273,00	312.210.950,00	81,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.219.600,00	40.018.743,00	86,58
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.219.600,00	40.018.743,00	86,58
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.102.224,00	61.694.400,00	94,77
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.102.224,00	61.694.400,00	94,77
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	341.392.800,00	334.670.800,00	98,03
10	Pengelolaan Pendapatan Daerah	341.392.800,00	334.670.800,00	98,03
	- Penagihan Pajak Daerah	341.392.800,00	334.670.800,00	98,03
	UPT Pendapatan Wil. IX Tojo Una-Una	1.245.275.024,00	1.192.215.075,00	95,74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	524.735.224,00	471.900.575,00	89,93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.501.450,00	268.624.150,00	85,69
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.501.450,00	268.624.150,00	85,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.143.774,00	83.394.725,00	96,81
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.143.774,00	83.394.725,00	96,81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.090.000,00	119.881.700,00	95,84
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.090.000,00	119.881.700,00	95,84
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	720.539.800,00	720.314.500,00	99,97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	720.539.800,00	720.314.500,00	99,97
	- Penagihan Pajak Daerah	720.539.800,00	720.314.500,00	99,97
	UPT Pendapatan Wil. X Donggala	1.223.685.624,00	1.149.539.843,00	93,94
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	763.859.531,00	689.764.043,00	90,30
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.250.000,00	370.050.000,00	83,49
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.250.000,00	370.050.000,00	83,49
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.579.531,00	179.461.243,00	99,93
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.579.531,00	179.461.243,00	99,93

1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.030.000,00	140.252.800,00	99,45
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.030.000,00	140.252.800,00	99,45
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	459.826.093,00	459.775.800,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	459.826.093,00	459.775.800,00	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	459.826.093,00	459.775.800,00	99,99
12	UPT Pendapatan Wil. XI Sigi	1.627.483.504,00	1.469.956.211,00	90,32
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.146.355.504,00	991.760.151,00	86,51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.087.704,00	626.400.490,00	84,98
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	737.087.704,00	626.400.490,00	84,98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	204.952.800,00	178.143.461,00	86,92
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.952.800,00	178.143.461,00	86,92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.315.000,00	187.216.200,00	91,63
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.315.000,00	187.216.200,00	91,63
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	481.128.000,00	478.196.060,00	99,39
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	481.128.000,00	478.196.060,00	99,39
	- Penagihan Pajak Daerah	481.128.000,00	478.196.060,00	99,39

3.3 INOVASI

Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan PAD khususnya Peningkatan Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan SAMSAT Drive Thru

Pelayanan SAMSAT Drive Thru merupakan upaya dalam meningkatkan layanan kesamsatan serta memudahkan masyarakat melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) yang tempat pelaksanaannya memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi tanpa perlu turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Mekanisme :

1) Pendaftaran

Wajib Pajak melaksanakan pendaftaran diloket Roda 2 maupun Roda. Pendaftaran diterima oleh petugas kepolisian untuk diteliti persyaratan sesuai dengan aturan petugas pendaftaran melaksanakan input data dan memvalidasi STNK.

2) Penetapan

Setelah menerima berkas dari pendaftaran kemudian ditetapkan pajak dari Jasa Raharja. Bagian penetapan memeriksa kebenaran pajak dan jasa raharja sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Bagian penetapan menyerahkan berkas kepada bagian pembayaran.

3) Pembayaran

Setelah menerima penetapan pajak dan jasa raharja dari bagian penetapan, petugas pembayaran melaksanakan pemanggilan kepada wajib pajak untuk melaksanakan penagihan sesuai dengan SKPD. Setelah menerima pembayaran kemudian SKPD divaidasi sebagai tanda bukti bahwa pajak kendaraan tersebut telah diterima.

2. Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC

Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC pada Samsat Induk Kota Palu merupakan bentuk komitmen Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan layanan kesamsatan pada Samsat Induk Kota Palu sehingga memberikan kemudahan memilih opsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi masyarakat Kota Palu.

3. Aplikasi SIGNAL – Samsat Digital Nasional

Dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) di setiap tahunnya, kini semakin aman dan mudah dengan aplikasi SIGNAL. Aplikasi SIGNAL sudah tersedia di google play store atau app store.

4. Pemanfaatan Data Kependudukan

Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kerjasama ini bertujuan agar dapat memkasimalkan pendapatan daerah melalui data kependudukan yang lebih valid atas kepemilikan objek pajak.

5. ATT (Aksi Tempe-tempel)

Merupakan bentuk aksi pemberitahuan dan teguran kepada Wajib Pajak yang telah menunggak pajak kendaraannya dengan menempel stiker pada kendaraan bermotor Wajib Pajak. Dengan adanya aksi pemberitahuan dan teguran tersebut, diharapkan agar Wajib Pajak segera melunasi pajak kendaraannya.

6. SambarMo (Samsat Bermotor Online)

Yaitu salah satu terobosan inovatif yang berawal dari diperlukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). SambarMo sebuah layanan Samsat yang dapat menjangkau daerah atau wilayah – wilayah pelosok yang akses wilayahnya tidak terjangkau oleh Samsat Induk, Pos Pelayanan dan Samsat Keliling.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disetiap tahunnya dalam melakukan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah dan secara operasional melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di samping itu mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penyerapan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan organisasi, pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan yang dilakukan baik di Badan maupun di UPT pengelolah pendapatan.

Secara umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat di kategorikan **Baik**. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

B. HAMBATAN

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Sasaran Program masih terdapat antara lain :

1. Kurang nyamannya ruangan pelayanan pembayaran pajak pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Sistem Online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT sering mengalami masalah;
3. Kurang optimalnya mobil yang digunakan untuk pelayanan Samsat Keliling (SAMKEL); dan
4. Kurangnya dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

C. LANGKAH SELANJUTNYA

1. Perlunya perbaikan/penataan kembali ruangan pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Perlunya perbaikan sistem online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT;
3. Perlunya penambahan dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIKA ANANDA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670727 198603 1 005

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU**

SAMSAT PALU

Kegiatan Gakkum

Rabu, 31 Juli 2024

 Pukul : 15.00 – 17.00 Wita

 Wilayah Kota Palu



**Pembayaran Pajak Kendaraan Bisa dilakukan
60 hari sebelum jatuh tempo**

**samsat pa**

**UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU**

SAMSAT PALU

Aksi Tempel – Tempel

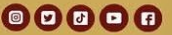
Kamis, 11 Januari 2024

 Pukul : 09.00 – 10.00 Wita

 Pasar Impres



**Tertib Pajak Untuk Kemajuan Bersama
Bayar Pajak Kendaraan dengan Tepat Waktu**

**samsat palu**



UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU

SAMSAT PALU

Kegiatan Gakkum

Selasa, 16 Juli 2024



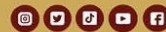
Pukul : 09.00 – 12.00 Wita



Wilayah Kota Palu



Tertib Pajak Untuk Kemajuan Bersama
Bayar Pajak Kendaraan dengan Tepat Waktu



samsat palu



UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU

SAMSAT PALU

Aksi Tempel – Tempel

Rabu, 24 Juli 2024



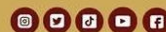
Pukul : 09.00 – 16.00 Wita



Wilayah Kota Palu



Bayar Pajak Kendaraan Anda Sebelum Jatuh Tempo
Kunjungi Layanan Samsat Terdekat



samsat palu



UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU

SAMSAT PALU

Samsat Keliling

Kamis, 25 Juli 2024



Pukul : 09.00 – 15.00 Wita



Halaman Korem 132/Tadulako



Tertib Pajak Untuk Kemajuan Bersama
Bayar Pajak Kendaraan dengan Tepat Waktu



UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU

SAMSAT PALU

Kegiatan Gakkum

Kamis, 18 Juli 2024



Pukul : 09.00 – 12.00 Wita



Wilayah Kota Palu



Pembayaran Pajak Kendaraan Bisa dilakukan
60 hari sebelum jatuh tempo





UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU

SAMSAT PALU

Aksi Tempel – Tempel

Kamis, 18 Januari 2024

🕒 Pukul : 09.00 Wita

📍 Bank Sulteng



Bayar Pajak Kendaraan Anda Sebelum Jatuh Tempo
Kunjungi Layanan Samsat Terdekat



UPT PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH I KOTA PALU

SAMSAT PALU

Samsat Keliling

Selasa, 16 Januari 2024

🕒 Pukul : 09.00 – 12.00 Wita

📍 Depan Museum Provinsi



Pembayaran Pajak Kendaraan Bisa dilakukan
60 hari sebelum jatuh tempo



**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



(Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi E-Kinerja)



(Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja Per Triwulan)



(Foto Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rincian Kegiatan di SIPD)



(Foto Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Desk Arsitektur Kinerja)



(Foto Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Matriks Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)